

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Tahun 2012
- A. Ridwan Halim, *Definisi Hukum Tentang Keadilan yang Sebenarnya*, Harian Merdeka, Kamis 28 April 1983 dan Jum'at 29 April 1983
- A. Ridwan Halim, *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987
- Abdul Kadir, *Pengenalan Teknologi Informasi*, Andi Press, Yogyakarta, 2005
- Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012).
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Anggita Doramia Lumbanraja, *Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19*, Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 01, Juli 2020
- Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2017

- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Dewi Safitri, *Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2020
- Dewi Safitri dan Bambang Waluyo, *Optimalisasi Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19*, *Justitia*| Vol. 8 No. 2 Tahun 2021
- Dian Cahyaningrum, *Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19*, *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Vol. XII, No.14/II/Puslit/Juli/2020
- Dian Erdianto dan Eko Soponyono, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Di Indonesia*, *Jurnal Law Reform*, Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015
- Efendi Jonaedi dan Suharto, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013
- Fathul Wahid, *Kamus Istilah Teknologi Informasi*, Ed. I.Andi, Yogyakarta, 2003

Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009).

Hafidlatul Waro Atami, *Keabsahan Hasil Pemeriksaan Saksi Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi Covid 19*, Fakultas Hukum/Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, 2021

Hanafi, *Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana di Indonesia*, Al' Adl : Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 2, Juli 2021

HLA. Hart, *The Consept Of Law*, Clarendon Press-Oxford, New York, 1997.

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013.

Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktek, Tehnik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bunga Rampai, Bandung, 2007

Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Suatu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP Sera dilengkapi dengan Hukum Internasional yang Relevan*. Djambatan, Jakarta, 2000

M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, UB Press, Malang, 2011.

M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 270*, Bogor: Politeia, 1983.

- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Cet. 1, Bandung, 2003
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005)
- O.S Hiariej Eddy, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- P.AF, Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- Purnadi Purbacakara dan Soerjono Soekanto, *Perihal Keadilan Umum*, Penerbit Alumni, Bandung 1987
- Ronny Hanitjo sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Ruth Marina Damayanti Siregar, 'Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana', *Jurnal Jurisprudence*, Vol 5, No 1, 2015
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, CV. Armico, Bandung, 1985.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000).

Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Sonyendah Retnaningsih, dkk, *Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia)*, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50 No. 1 (2020)

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Hukum Sudarto FH UNDIP, Semarang, 2009.

Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Desember 2014

Tetania Damayanti, *Implementasi Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Terhadap Proses Persidangan Perkara Pidana Yang Dilaksanakan Melalui Online Di Pengadilan Negeri Surakarta Selama Masa Pandemi Covid-19*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2021

Tim Penyusun Buku Panduan Penyelenggaraan Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Pasundan, *Buku Pasundan Tugas Akhir*, Cet, 1, Bandung, 2019.

Wahyu Iswantoro, *Persidangan Pidana Secara Online*, Respon Cepat Ma Hadapi Pandemi Covid-19 *SELISIK* - Volume 6, Nomor 1, Juni 2020

Waluyadi, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Perspektif Hukum Positif*, Jakarta: Djambatan, 2001.

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perubahan ke Dua dan ke Tiga.

Undang-undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Jakarta, 2009, hlm.3

C. Sumber Lain

<http://scholar.unand.ac.id/29531/2/BAB%20I.pdf>

<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-keadilan-dan-jenis-jenisnya-menurut-para-ahli/>

<https://leip.or.id/infografis-perma-nomor-4-tahun-2020-tentang-administrasi-dan-persidangan-pidana-secara-elektronik/>

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/bagaimana-pengadilan-menghadapi-pandemi-covid19-diskusi-virtual-ditjen-badilag-dan-family-court-of-australia/diakses>

Ravina Savitri, [efektivitas-persidangan-virtual-di-masa-pandemi-covid-19/https://kawanhukum.id/](https://kawanhukum.id/19/efektivitas-persidangan-virtual-di-masa-pandemi-covid-19/)

Wawancara dengan Irwan Saleh Indrapraja, S.H., M.H. selaku Advokat atau Penasehat Hukum

Wawancara dengan Tuty Haryati, S.H., M.H. selaku Hakim Pidana atau perwakilan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung 5 April 2022